

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdoellah A.Y & Rusfiana. (2016). *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Absori, F. M., Dimiyati, K., Absori, A., Achmadi, A., & Basri, M. (2016). Penyusunan Peraturan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah: Suatu Tinjauan Terhadap Pembentukan Perda Yang Aspiratif. In *Preparation of Local Regulations in the Framework of Regional Autonomy: An Overview of the Formation of an Aspirational Regulation*"), 4th National Conference Of The Muhammadiyah University Postgraduate Graduate Program Proceedings (Vol. 226).

Afandi, M. I., & Warjio. (2015). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dalam Pencapaian Target Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(2), 92-113. Retrieved from <http://ojs.uma.ac.id/index.php/adminpublik/article/view/70>

Alfarabi, A. S. (2021). Pengaturan Sanksi Administratif Protokol Kesehatan Melalui Peraturan Kepala Daerah. *WASAKA HUKUM*, 9(1).

Arifin, M. Z. (2019). Konsep Dasar Otonomi Daerah Di Indonesia Pasca Reformasi. *Researchgate*, 1(1), 1-5.

Aryani, S. (2017). Eksistensi Peraturan Kepala Daerah Sebagai Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah. *Badamai Law Journal*, 2(1), 153-172.

Banyuasin, B. K. (2021). *Kabupaten Musi Banyuasin Dalam Angka 2021 Musi Banyuasin Regency Figures*. Sekayu: Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Banyuasin.

Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori dan Poroses* (Yogyakarta: Media Presindo, 2007).

Buku Pegangan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah. (2007). In *Pengembangan Ekonomi Daerah dan Sinergi Kebijakan Investasi Pusat - Daerah*. Jakarta: Republik Indonesia.

Buku Musi Banyuasin 2030 : World Capital Of Sustainable Energy Based On Palm Oil, 2021.

Buku I Risalah Rapat Pembahasan 4 (Empat) Raperda Kabupaten Musi Banyuasin, 2020.

Buku II Risalah Rapat Pembahasan 4 (Empat) Raperda Kabupaten Musi Banyuasin, 2020.

Buku III Risalah Rapat Pembahasan 4 (Empat) Raperda Kabupaten Musi Banyuasin, 2020.

Haerul, Akib, H., & Hamdan. (2016). Implementasi Kebijakan Program Makassar Tidak Rantasa di Kota Makassar . *Jurnal Administrasi Publik*, 6(2), 21-34. Retrieved from <http://ojs.unm.ac.id/index.php/iap/article/view/2477/1272>

HAM, K. H. D., & BARAT, K. W. S. Peraturan Daerah Dalam Konsep Negara Hukum Dan Permasalahannya.

Harahap, A. C. P., Harahap, D. P., & Harahap, S. R. (2020). Analisis Tingkat Stres Akademik Pada Mahasiswa Selama Pembelajaran Jarak Jauh Dimasa Covid-19. *Biblio Couns: Jurnal Kajian Konseling dan Pendidikan*, 3(1), 10-14.

Haryanti, A. (2019). Sistem Pemerintahan Daerah.

Hesel Nogi S. Tangkiisan, Kebijakan Publik yang Membumi: Konsep, Strategi dan Kasus (Yogyakarta, Lukman Offset dan YPASI, 2003).

Husein Umar, 2000: Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Iskandar, J. (2012). Kapita Selekta teori Administrasi Negara. *Bandung: Puspaga*

Islamy, M.I. (2000). Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta: Sinar Grafika.

Ismail, M. H., & Sofwani, A. (2016). Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik. *JRP (Jurnal Review Politik)*, 6(2), 195-224.

Mahardini, M. M. A. (2020). Analisis situasi penggunaan google classroom pada pembelajaran daring fisika. *Jurnal Pendidikan Fisika*, 8(2), 215-224.

Moelong, L. J. (2012). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Muhammad Yunizar, P., Rochmiatun, E., & Mikail, K. (2021). Peran Partai Politik Dalam Pendidikan Politik Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi

Pada Partai Keadilan Sejahtera Di DPC PKS Kecamatan Kalidoni Kota Palembang) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang).

Paton dalam Lexy J. Moleong, 2012: *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi), cetakan ke XXX, Remaja Rosdakarya, Bandung.

Pencegahan Covid-19 Dalam Perspektif Islam. (2022). Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh.

Quamila, C. F. (2021). *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kepatuhan Masyarakat Terhadap Kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (Pkm) Dalam Rangka Penanganan Covid-19 Di Kota Semarang* (Doctoral Dissertation, Diponegoro University).

Reny Rawasita, et.al: *Menilai Tanggung Jawab Sosial Peraturan Daerah*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), 2009).

Riant Nugroho. (2004). *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta : PT Gramedia.

Shirvani, H. (1976). *The New Grolier Webster International Dictionary of English Language*. Encyclopedic Edition, Grolier Incorporated, New York.

Sikumbang, S. M., Sjarif, F. A., & Salampessy, M. Y. (2015). *Pengantar Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan*.

Sisworini, M. (2007). *Perubahan kebijakan tata cara pengajuan keberatan pajak : Studi tentang perubahan konteks pasal 25 ayat (7) UU No 16 tahun 2000 menjadi UU No 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).

Solichin, A. W. (1997). *Analisis Kebijaksanaan: dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suherman, P. K. (2017). *Delegasi Regulasi dan Simplifikasi Regulasi dalam Pembentukan Peraturan Kepala Daerah*. *Jurnal Advokasi*, 7(1), 72481.

Suherman, D. (2020). *Peran Aktor Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Mengatasi Penyebaran COVID-19 Di Indonesia*. *Ministrate: Jurnal Birokrasi Dan Pemerintahan Daerah*, 2(2), 51-62.

Susilo Rahardi, C., & Hidayat, R. (2008). Kepentingan Para Aktor Dalam Pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Usaha Rumah Pemandokan Di Kabupaten Jember.

Suwitri, S. (2008). Konsep dasar kebijakan publik. *Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro*.

Wayne Parsons, Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan (Jakarta: Kencana, 2006).

Yadianto. (1996). Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Bandung: M2s*.

Yuliyanti, F. (2021). *Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Pada Kepatuhan Masyarakat Terhadap Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 Di Desa Banyukuning Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang* (Doctoral Dissertation, Diponegoro University).

Zaelani. (2012). Pelimpahan Wewenangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Delegation Of Authority The Establishment Of Legislation Regulation). *Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 9 No. 1*.

B. Internet

(<https://jdih.babelprov.go.id/content/dasar-pembentukan-peraturan-gubernur> diakses pada hari Sabtu, 12 Juni 2021 pukul 19:32 WIB).

(https://jdih.kemenpppa.go.id/peraturan/UU_No_12_Tahun_2011_1.pdf diakses pada hari Sabtu 12 Juni 2021 pukul 20:11 WIB).

(<https://jdih.babelprov.go.id/content/dasar-pembentukan-peraturan-gubernur> diakses pada hari Minggu, 13 Juni 2021 pukul 13:07 WIB)

(<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt510e536c2e2e5/pe-rbedaan-pergub-dengan-perda/> diakses pada hari Minggu 13 Juni 2021 pukul 13:29 WIB).

(2020, Oktober 1). Siasati Pandemi Gubernur Sumsel Keluarkan Pergub 37 Tahun 2020 (Unggahan Berita Online). Diakses dari <https://www.sonora.id/read/422362472/siasati-pandemi-gubernur-sensel-keluarkan-pergub-37-tahun-2020?page=2>.

(2020, September 17). Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Keluarkan Perbup . . . (Unggahan Berita Online). Diakses dari <https://jurnalsumsel.pikiran-rakyat.com/sumatera-selatan/pr-74750694/bupati-musi-banyuasin-dodi-reza-alex-keluarkan-perbup->

warga- tak-pakai-masker-denda-rp20-ribu.

DW (2020, Desember 2). Muba, Kabupaten Pertama Punya Perda *Covid-19* (Unggahan Berita Online). Diakses dari <https://mediaindonesia.com/nusantara/365579/muba-kabupaten-pertama-punya-perda-covid-19>.

(<https://www.prudential.co.id/id/pulse/article/apa-itu-sebenarnya-pandemi-covid-19-ketahui-juga-dampaknya-di-indonesia/> diakses pada Senin, 08 November 2021 pukul 13:50 WIB).

(<https://ners.unair.ac.id/site/index.php/news-fkp-unair/30-lihat/808-bedanya-endemi-epidemi-dan-pandemi> diakses pada Senin, 08 November 2021 pukul 13:57 WIB).

(<https://www.kemkes.go.id/folder/view/full-content/structure-faq.html> diakses pada Senin, 22 November 2021 pukul 11:51 WIB).

(<https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa/qa-for-public> diakses pada Senin, 22 November 2021 pukul 11:54 WIB).

(<https://covid19.go.id/peta-sebaran> diakses pada Senin, 22 November 2021 pukul 12:24 WIB).

Julian Simanjuntak, Edy Surya Dharmawan, “Analisis Perubahan Kebijakan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Jaminan Kesehatan Menjadi Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Jaminan Kesehatan”, diakses pada tanggal 21 Mei 2021 Pukul 10:34 WIB dari <https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/30546>.

Kebijakan Publik dan Good Governancy, 2018. Diakses dari <https://repository.ung.ac.id/get/karyailmiah/6523/Arifin-Tahir-Kebijakan-Publik-dan-Good-Governancy.pdf> pada Kamis, 4 November 2021 pukul 23:01 WIB.

C. Perundang-Undangan

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR) Nomor : III/MPR/2003 tentang Urutan Peraturan Perundang-Undang Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Pembentukan Peraturan Perundang Undangan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Pencegahan dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Daerah.

Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2742/BAK tertanggal 21 September 2021 perihal Penegakan Hukum Protokol Kesehatan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*).

D. WAWANCARA

Wawancara bersama Ibu Romasari Purba, S.H, M.H. (Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin), pada tanggal 07 Februari 2022.

Wawancara bersama Ibu In Parlina, S.H, M.H. (Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Banyuasin), pada tanggal 07 Februari 2022.

Wawancara bersama Bapak Taufik, S.IP. (Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Banyuasin / Penyidik PPNS), pada tanggal 24 Mei 2022.

Wawancara bersama Ibu Lismawati, SKM., M.Kes. (Kepala UPT Puskesmas Lumpatan / Tenaga Kesehatan), pada tanggal 24 Mei 2022

Wawancara bersama Bapak H. Thamrin Nawawi, M.Pd.I (Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Musi Banyuasin / Tokoh Agama), pada tanggal 25 Mei 2022.

Wawancara bersama Bapak Sriyanto, S.Pd.I (Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Musi Banyuasin / Tokoh Masyarakat), pada tanggal 25 Mei 2022.

Wawancara bersama Kakanda Chandra Wijaya, S.H. (Staf Khusus Bupati Bidang Pemuda, Mahasiswa, Sosial dan Pemberdayaan Disabilitas / Tokoh Pemuda), pada tanggal 26 Mei 2022.